

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), khususnya pada bidang lingkungan perlu diupayakan peningkatan kualitas perilaku masyarakat terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Dengan menjaga dan melestarikan lingkungan, masyarakat dapat mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Menurut Ayu Artiningsih (2008), faktor penting penyebab terjadinya perubahan lingkungan hidup yang tidak baik adalah adanya pertumbuhan penduduk yang semakin banyak. Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah sehingga mengakibatkan pemukiman semakin luas dan padat. Hal demikian yang menyebabkan penambahan sampah semakin meningkat, sehingga sampah yang ada pada masyarakat harus dikelola dengan baik agar tidak lagi mengganggu lingkungan masyarakat itu sendiri.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), di Indonesia mempunyai tantangan yang cukup besar dalam pengelolaan sampah. Terlebih penanganan sampah plastik yang sulit untuk terurai atau tidak ramah lingkungan. Dalam peningkatan timbunan sampah di Indonesia jumlahnya mencapai 175.000 ton/hari atau setara dengan 64 juta ton/tahun. Pada tahun 2012 pemerintah melakukan studi di beberapa kota di

Indonesia, sehingga pola pengelolaan sampah di Indonesia masih sangat minim diantaranya: diangkut dan ditimbun di TPA (69%), dikubur (10%), dikompos dan didaur ulang (7%), dibakar (5%). Dari hasil persentase tersebut permasalahan penimbunan sampah yang tidak dikelola sangat besar, oleh karena itu lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan sistem *open dumping* atau bahkan dibakar. Ini menjadi masalah umum dalam pembangunan lingkungan perkotaan yang ditandai dengan keadaan tempat tinggal yang kumuh, serta lingkungan yang jauh dengan kriteria kehidupan lingkungan yang layak.

Untuk itu dalam mewujudkan pembangunan lingkungan perkotaan dengan baik perlu adanya pengelolaan lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang, dibuang atau sudah tidak terpakai lagi dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan sampah diselenggarakan atas asas tanggung jawab dan kesadaran dalam menjaga keberlanjutan kesehatan dan keamanan lingkungan. Menurut Enri Damanhuri dan Tri Padmi (2010: 5), pengelolaan sampah juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, tetapi juga aspek non teknis seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil sampah agar ikut serta secara aktif atau pasif dalam aktivitas penanganan tersebut.

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu provinsi yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sampahnya yang masih menjadi masalah dimensional. Kondisi sampah yang banyak menumpuk di tempat pembuangan sampah sementara, tentu saja membawa dampak buruk terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut. Disisi lain sampah yang menumpuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan mendatangkan wabah penyakit, serta dapat merusak citra Provinsi Yogyakarta sebagai kota pariwisata. Sedikitnya tempat pembuangan sampah menjadi persoalan teknis yaitu keterbatasan lahan kosong serta tidak semua warga berkenan untuk dibangun TPS disekitar lingkungannya (Mulasari, 2016: 97).

Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 luas hutan di D.I Yogyakarta sebesar 5,87% dari seluruh wilayah yang ada di D.I Yogyakarta, sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 3.720.912 jiwa. Hal ini yang menjadi faktor tidak seimbangnya peningkatan produksi dan pengelolaan sampah di Provinsi D.I Yogyakarta.

Pemerintah D.I Yogyakarta melakukan pemantauan dan upaya penanganan pengelolaan sampah terhadap masyarakat yang membuang sampah secara illegal, walaupun memang penanganan pembuangan sampah ilegal sulit dilakukan tetapi pemerintah mencoba membentuk kerjasama antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Yogyakarta yang disebut sebagai Sekertariat Bersama Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul (Sekber Kartamantul). Kartamantul adalah satuan kerja yang bertugas

mengawasi pengelolaan sampah di tingkat provinsi untuk bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten/kota. Pengawasan yang dilakukan merupakan penarikan retribusi, pengumpulan dari sumber untuk dibawa ke TPS, pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, sampai dengan pengoprasian TPA Piyungan. Dari beberapa kabupaten/kota yang tergabung didalamnya memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam upaya pengelolaan sampah di wilayah sekitarnya (Mulasari, 2016: 97).

Setelah kurang lebih 14 tahun TPA Piyungan dikelola oleh Kartamantul secara otonom, kewenangan pengelolaan TPA Piyungan diambilalih oleh Pemerintah Provinsi DIY. Pengelolaan TPA Piyungan telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DIY sejak 1 Januari 2015. Pengambilalihan ini berarti menggeser kewenangan Kartamantul, keputusan puncak yang semula berada di tangan ketiga daerah (Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul) telah beralih ke Pemerintah Provinsi DIY (Tribunjogja, 25 Januari 2015). Oleh sebab itu pemerintah kabupaten Sleman mempunyai kebijakan dalam pengelolaan sampah untuk menunjang masalah lingkungan yang kumuh dan tertinggal. Seperti yang sudah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat perlu dilakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Kemudian banyak permasalahan yang ditemukan di kabupaten Sleman, mulai dari masyarakat yang masih belum sadar akan lingkungan hidup sehat dengan membuang sampah di aliran sungai seperti limbah padat manusia, limbah industri, dan limbah non organik lainnya. Kondisi yang seperti ini yang dikhawatirkan dapat menjadi kebiasaan buruk jika tidak segera dilakukan upaya-upaya perbaikan akan menyebabkan dampak degradasi lingkungan yang semakin besar. Pembuangan sampah langsung ke sungai di kabupaten Sleman, merupakan bukti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Karena pada dasarnya bukan hanya pemerintah yang berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga sudah menjadi tanggung jawab masyarakat (Slemankab.go.id, 26 september 2017).

Peran serta dari masyarakat secara umum hanya sebatas pembuangan saja dan belum sampai pada tahapan pengelolaan sampah yang dapat bermanfaat kembali bagi masyarakat. Pengelolaan sampah yang sederhana yaitu dengan memisahkan sampah berbahan organik dan sampah berbahan anorganik pada kelompok masyarakat di kabupaten Sleman. Menurut Slamet (1993), masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keahlian pribadi, kepribadian, serta pertanggungjawabannya melalui proses belajar dan pengarahan secara langsung. Sehingga memerlukan sosialisasi yang intensif dari pemerintah kepada masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup membuat program dalam pengelolaan sampah yang disebut dengan program TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah *Reuce*, *Reduce* dan *Recycle*) berbasis kelompok masyarakat. Untuk memfasilitasi masyarakat pemukiman agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya, yang berarti sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dapat diolah kembali menjadi bahan yang berguna atau bermanfaat. Melalui program ini sampah dapat digunakan lagi dan di daur ulang guna mengurangi penumpukan sampah diberbagai daerah di kabupaten Sleman.

Konsep pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman agar masyarakat menjadi pihak utama dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator yang akan mengembangkan sumber daya dan dana dengan menumbuhkan rasa keterikatan dan rasa tanggungjawab masyarakat yang sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan. Dalam mendukung program diatas, pemerintah kabupaten Sleman berencana membangun tempat pembuangan akhir (TPA) dengan pengelolaan sampah terpadu di wilayah Prambanan pada tahun 2018 mendatang. Sehingga kabupaten Sleman tidak lagi memanfaatkan tempat pembuangan akhir yang beradadi Piyungan, Bantul (Seruji.co.id, 27 Oktober 2017).

Dari pernyataan diatas menjadi alasan bagi penulis untuk memilih judul “Efektivitas Program Pengelolaan Sampah TPS3R Berbasis Kelompok Masyarakat di Kabupaten Sleman”, karena total sampah di Kabupaten Sleman tidak seimbang dengan jumlah penduduknya. Tercatat bahwa jumlah sampah kurang lebih 2.500 m³ perhari sedangkan jumlah penduduknya tidak tetap yang sewaktu-waktu dapat semakin meningkat, mengingat Kabupaten Sleman adalah daerah wisata dan pendidikan. Menurut Dinas Lingkungan Hidup DIY, total timbunan sampah di Sleman sebesar 8.000 m³/hari dengan 60% diantaranya merupakan sampah plastic yang susah diurai.

Dalam permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Sleman merupakan fenomena yang kompleks yang tidak akan mudah diatasi oleh pemerintah. Dari berbagai pemaparan diatas, penulis sangat tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai permasalahan pengelolaan sampah yang harus dilakukan langsung oleh masyarakat melalui kesadaran pada lingkungan sekitarnya demi mewujudkan lingkungan yang sehat, bersih dan rapi. Hingga akhirnya penelitian ini saya berikan judul “**Efektivitas Program Pengelolaan Sampah TPS3R Berbasis Kelompok Masyarakat di Kabupaten Sleman** (Studi Kasus: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Tahun 2015)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penyelenggaraan program pengelolaan sampah TPS3R berbasis kelompok masyarakat di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan sejauh mana efektivitas penyelenggaraan program pengelolaan sampah TPS3R berbasis kelompok masyarakat di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, hasil dari penelitian ini akan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pemerintahan khususnya.
2. Menambah referensi hasil penelitian yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian bagi mahasiswa ilmu pemerintahan selanjutnya, serta diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran guna memperluas ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah.
2. Mampu menjadi sumbangsih pemikiran bagi pemerintah kabupaten Sleman dalam mengambil kebijakan program pengelolaan sampah selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang merupakan berhasil dalam mencapai sesuatu target yang sudah ditentukan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berarti efek yang pengaruhnya dapat membawa hasil dari suatu target yang sudah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap program, kegiatan, ataupun organisasi. Dapat dikatakan berhasil jika tujuan atau sasaran tersebut dapat memenuhi target. Efektivitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga secara sependai mungkin dalam usaha mengejar tujuan operasi dan tujuan operasionalnya (Steers, 1985: 44). Lebih lanjut, teori dikembangkan menjadi lebih detail oleh Supriyono (2000), yakni efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai.

Sementara itu, Sharma dalam Tangkilisan (2005: 64) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain:

- 1) Produktivitas organisasi atau output

- 2) Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi
- 3) Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Georgopolous dan Tannambaum (1985: 50), menyatakan bahwa efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.

Menurut Siagian (1998), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah di tetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Sedangkan menurut (Soewarno Handayani, 1996: 16):

“Efektivitas adalah bila suatu sasaran atau tujuan telah dicapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Jadi kalau sasaran atau tujuan itu tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif”.

Secara lebih lengkap (Chris Argyris, 1968: 312) menyatakan:

“Efektivitas adalah keseimbangan atau penekanan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan pemecahan masalah dan pemanfaatan tenaga manusia. Efektivitas program adalah tingkat keberhasilan suatu program dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan”.

Steers (dalam Tangkilisan, 2005) mengemukakan bahwa efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasaran tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikatakan pula bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien yang ditinjau dari sisi masukan maupun sisi keluaran. Sumber daya dalam hal ini meliputi ketersediaan personil, kualitas sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasana, serta metode yang digunakan.

b. Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil tindakan yang dilakukan tidak tepat, sehingga tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai capaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (1998), yaitu:

1. Tercapainya tujuan dan sasaran. Apabila tujuan suatu organisasi tercapai dan tepat sasaran, maka program tersebut dapat dikatakan efektif.
2. Pemanfaatan sumber-sumber secara optimal. Apabila sumber-sumber yang tersedia, baik sumber daya maupun sumber lain dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai suatu tujuan organisasi, maka program tersebut dapat dikatakan efektif.

Selain itu kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yaitu:

1. Pendekatan sumber (*resource approach*), yaitu mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat seberapa jauh efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan sasaran (*goal approach*) di mana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana organisasi.

Beberapa pengukuran efektivitas diatas dapat mengetahui sejauh mana program pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sleman. Kemudian Duncan (dalam Tangkilisan, 2005) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu, dasar hukum, sasaran program dan sasaran yang merupakan target konkret.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan

konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

2. Program

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Menurut Charles O. Jones program adalah cara cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dengan dipandu kerangka konseptual teori program , teori *driven evaluation*, menyediakan suatu penilaian holistik mengenai suatu program evaluasi tidak hanya menghasilkan informasi antara intervensi dan pengaruh, akan tetapi juga informasi yang kaya mengenai bagaimana dan mengapa suatu program dapat tercapai atau gagal untuk mencapainya. Beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak, yaitu:

1. Program cenderung lebih membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program biasanya diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa garis besar dari definisi program adalah suatu rencana atau rancangan yang bertujuan untuk mencapai sebuah sasaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang, kelompok, maupun organisasi. Berangkat dari sumber di atas sudah tentu sebuah program pengelolaan sampah yang dibawa dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Sleman atas pelaksanaan program TPS3R berbasis kelompok masyarakat dalam kaitannya dengan efektivitas pelaksanaan program tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan program/kebijakan ditentukan oleh banyak variable atau faktor-faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Faktor yang sejalan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III dalam bukunya *Implementing Public policy* pelaksanaan program kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Tersedianya informasi mengenai pelaksanaan suatu program ataupun informasi yang berkaitan dengan program tersebut yang sangat dibutuhkan. Sehingga komunikasi aktor-aktor pelaksanaannya sangat diperlukan untuk mengetahui informasi tersebut.

2. Sumber Daya

Pembagian potensi-potensi yang ada harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh aktor-aktor pelaksanaannya.

3. Sifat Pelaksanaan/Diposisi

Sifat pelaksanaan yang akomodatif merupakan syarat yang diperlukan untuk suatu program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur yang ada harus menggambarkan suatu struktur yang ada statis tapi memberdayakan suatu staf yang ada.

3. Pengelolaan Sampah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Menurut Enri dan Tri Padi (2010: 5), pengertian pengelolaan bukan hanya menyangkut aspek teknis, seperti kesehatan, kualitas lingkungan dan sumber daya yang berguna, tetapi juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengorganisir, bagaimana membiayai dan bagaimana melibatkan masyarakat penghasil sampah agar ikut serta secara aktif atau pasif dalam aktivitas pengelolaan tersebut.

a. Pengelolaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi

atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Suharsimi Arikunta (1988), pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Mary Parker Follet (1999) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat diantaranya:

- 1) Adanya penggunaan sumber organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- 2) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- 3) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien

1) Fungsi-fungsi Pengelolaan

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah:

- a) Perencanaan yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, proses suatu perencanaan harus dimulai dari penetapan tujuan yang akan dicapai melalui analisis kebutuhan serta dokumen yang lengkap, kemudian menetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- b) Pengorganisasian, sebagai proses penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan pembagian pekerjaan setiap personalia, penetapan departemen-departemen (subsistem) serta hubungan-hubungannya.
- c) Pelaksanaan, lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi dalam sebuah lembaga. Pelaksanaan sangat penting untuk output kongkrit dengan adanya implementasi aktivitas yang diusahakan dalam suatu tindakan atau usaha yang menimbulkan aksi.

d) Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindak korektif untuk penyempurnaan lebih lanjut dalam meningkatkan mutu organisasi.

b. Sampah

1) Pengertian Sampah

Sampah adalah sesuatu barang yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Sampah merupakan sumberdaya yang tidak siap pakai. Sampah juga disebut limbah yang bersifat padat, yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik, yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

2) Sumber Sampah

Menurut Teti Suryati (2009: 16) sampah dihasilkan dari beberapa sumber, diantaranya:

1. Rumah tangga, umumnya terdiri dari sampah organik dan anorganik yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Misalnya, buangan dari dapur, taman dan alat-alat rumah tangga.
2. Daerah komersial, yaitu sampah yang dihasilkan dari perkotaan, restoran, pasar perkantoran, hotel, dan lain-lain. Biasanya terdiri dari bahan pembungkus sisa-sisa makanan, kertas dari perkantoran, dan sebagainya.

3. Sampah institusi, berasal dari sekolah, rumah sakit, dan pusat pemerintahan.
4. Sampah industri, berasal dari proses produksi industri, dari pengolahan bahan baku hingga hasil produksi.
5. Sampah dari fasilitas umum, berasal dari taman umum, pantai, atau tempat rekreasi.
6. Sampah dari hasil konstruksi bangunan, yaitu sampah yang berasal dari sisa-sisa pembuatan gedung, perbaikan dan pembongkaran jalan atau jembatan, dan lain-lain.
7. Sampah dari hasil pengelolaan air buangan dan sisa-sisa pembakaran dari incinerator.
8. Sampah pertanian, berasal dari sisa-sisa pertanian yang tidak dimanfaatkan lagi.

3) Jenis Sampah

Di negara industri seperti Indonesia, jenis sampah atau yang dianggap sejenis sampah dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya:

1. Pemukiman: biasanya berupa rumah atau apartemen. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, sampah kebun, kayu, kaca, logam, barang bekas rumah tangga, limbah berbahaya dan sebagainya
2. Daerah komersial: yang meliputi pertokoan, rumah makan, pasar, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kertas, kardus, plastik, kayu, sisa

makanan, kaca, logam, limbah berbahaya dan beracun, dan sebagainya

3. Institusi: yaitu sekolah, rumah sakit, penjara, pusat pemerintahan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan sama dengan jenis sampah pada daerah komersial - Konstruksi dan pembongkaran bangunan: meliputi pembuatan konstruksi baru, perbaikan jalan, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kayu, baja, beton, debu, dan lain-lain
4. Fasilitas umum: seperti penyapuan jalan, taman, pantai, tempat rekreasi, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain rubbish, sampah taman, ranting, daun, dan sebagainya
5. Pengolah limbah domestik seperti Instalasi pengolahan air minum, Instalasi pengolahan air buangan, dan insinerator. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain lumpur hasil pengolahan, debu, dan sebagainya
6. Kawasan Industri: jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa proses produksi, buangan non industri, dan sebagainya
7. Pertanian: jenis sampah yang dihasilkan antara lain sisa makanan busuk, sisa pertanian.

4) Sifat Sampah

Menurut sifatnya sampah dipilah menjadi tiga, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3 (Bahan Berbahaya Beracun). Masing-masing

sampah diklasifikasikan berbeda menurut sifatnya, jika pengklasifikasian ini diterapkan diharapkan dapat memudahkan proses pengelolaan sampah pada tahap selanjutnya (Daniel, 2009).

1. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuhan). Jenis sampah ini tidak berbahaya karena bisa terurai secara biologis oleh alam.

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah lawan dari sampah organik yaitu sampah yang bukan berasal dari makhluk hidup. Jenis sampah ini dapat didaur ulang seperti sampah plastik atau logam.

3. Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Sampah B3 merupakan jenis sampah yang bisa dikategorikan membahayakan manusia dan lingkungan, Sampah ini mengandung bahan kimia berbahaya.

c. Komponen Pengelolaan Sampah

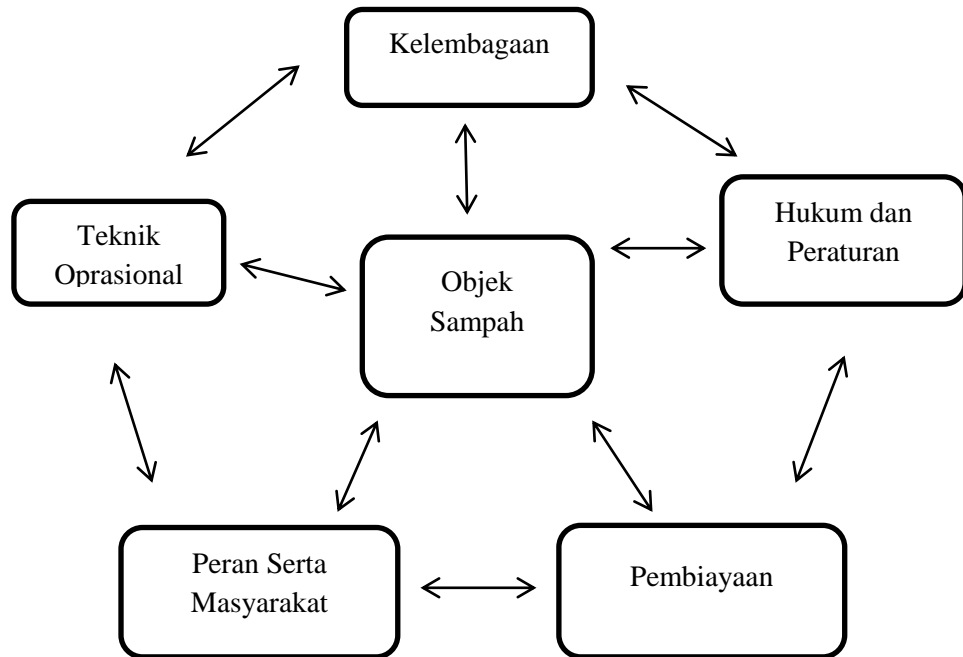
Menurut pendapat Sudrajat (2006: 56), keberhasilan pengelolaan sampah, bukan hanya tergantung aspek teknis semata, tetapi mencakup juga aspek non teknis, seperti bagaimana mengatur sistem agar dapat berfungsi, bagaimana lembaga atau organisasi yang sebaiknya mengelola, bagaimana membiayai sistem tersebut dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana melibatkan masyarakat penghasil sampah dalam aktivitas penanganan sampah. Kebijakan pengelolaan sampah perkotaan

(yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum) di Indonesia memosisikan bahwa pengelolaan sampah perkotaan merupakan sebuah sistem yang terdiri dari 5 komponen sub sistem, yaitu:

1. Regulasi
2. Kelembagaan dan organisasi
3. Teknik operasional
4. Pembiayaan
5. Peran serta masyarakat.

Namun bila diperhatikan, konsep ini sebetulnya berlaku tidak hanya untuk pendekatan pemecahan masalah persampahan, tetapi untuk sektor lain yang umumnya terkait dengan pelayanan masyarakat. Oleh karenanya kelima komponen tersebut lebih tepat disebut sebagai aspek-aspek penting yang mempengaruhi manajemen persampahan (Sudrajat, 2006: 56).

Gambar 1.1 Skema Manajemen Pengelolaan Sampah



Sumber: Diktat Kuliah Sanitasi dan Kesehatan Lingkungan

1. Regulasi

Manajemen persampahan kota membutuhkan kekuatan dan dasar hukum, seperti dalam pembentukan organisasi, pemungutan retribusi, ketertiban masyarakat, dan sebagainya. Peraturan yang diperlukan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah di perkotaan antara lain adalah yang mengatur tentang:

- a) Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan sampah
- b) Rencana induk pengelolaan sampah kota
- c) Bentuk lembaga dan organisasi pengelola
- d) Tata-cara penyelenggaraan pengelolaan
- e) Besaran tarif jasa pelayanan atau retribusi

- f) Kerjasama dengan berbagai pihak terkait, diantaranya kerjasama antar daerah, atau kerjasama dengan pihak swasta.

2. Kelembagaan dan Organisasi

Aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin yang bertumpu pada prinsip teknik dan manajemen yang menyangkut aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kondisi fisik wilayah kota, dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat kota. Perancangan dan pemilihan bentuk organisasi disesuaikan dengan (Rahadiyan dan Widagdo, 2005):

- a) Peraturan pemerintah yang membinanya
- b) Pola sistem operasional yang diterapkan
- c) Kapasitas kerja sistem
- d) Lingkup pekerjaan dan tugas yang harus ditangani.

3. Teknik Operasional

Menurut SNI 19-2454-2002, teknik operasional pengelolaan sampah kota meliputi dasar-dasar perencanaan untuk kegiatan:

- a) Pewadahan Sampah

Proses awal dalam penampungan sampah terkait langsung dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu cara penampungan sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke TPA. Tujuannya adalah

menghindari agar sampah tidak berserakan sehingga tidak mengganggu lingkungan.

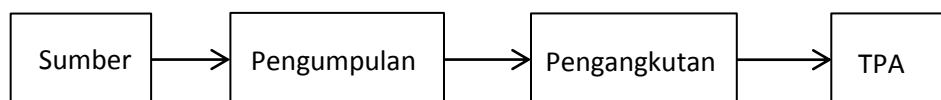
b) Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah yaitu cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan/pewadahan sampai ketempat pembuangan sementara. Menurut Badan Standar Nasional (BKN), Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dikelompokkan dalam 2 (dua) yaitu:

1) Pola Individual

Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah, kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara/TPS sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir/TPA.

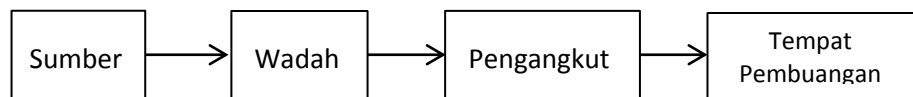
Gambar 1.2 Pola Pengumpulan Sampah Individual Tak Langsung



2) Pola Komunal

Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ketempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan/ ke truk sampah yang menangani titik pengumpulan kemudian diangkut ke TPA tanpa proses pemindahan.

Gambar 1.3 Pola Pengumpulan Sampah Komunal



c) Pemindahan Sampah

Proses pemindahan sampah adalah memindahkan sampah hasil pengumpulan ke dalam alat pengangkutan untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah depo pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut.

d) Pengangkutan Sampah

Pengangkutan adalah kegiatan pengangkutan sampah yang telah dikumpulkan di tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat pembuangan akhir. Berhasil tidaknya penanganan sampah juga tergantung pada sistem pengangkutan yang diterapkan. Pengangkutan sampah yang ideal adalah dengan truck container tertentu yang dilengkapi alat pengepres.

e) Pembuangan (pemrosesan) akhir sampah

Pembuangan akhir merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk

diolah lebih lanjut. Prinsip pembuangan akhir adalah memusnahkan sampah domestik di suatu lokasi pembuangan akhir. Secara umum teknologi pengolahan sampah dibedakan menjadi 3 (tiga) metode yaitu: *Open Dumping*, *Sanitary Landfill*, *Controlled Landfill*.

1) *Open Dumping*

Metode open dumping ini merupakan sistem pengolahan sampah dengan hanya membuang / menimbun sampah disuatu tempat tanpa ada perlakuan khusus atau sistem pengolahan yang benar, sehingga sistem open dumping menimbulkan gangguan pencemaran lingkungan.

2) *Sanitary Landfill*

Metode pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Pekerjaan pelapisan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi.

3) *Controlled Landfill*

Metode controlled landfill adalah sistem open dumping yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan *open dumping* dan *sanitary landfill* yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang di padatkan atau setelah mencapai periode tertentu.

4. Pembiayaan atau Retribusi

Sebagaimana kegiatan yang lain, maka komponen pembiayaan sistem pengelolaan sampah kota secara ideal dihitung berdasarkan:

- a) Biaya investasi
- b) Biaya operasi dan pemeliharaan
- c) Biaya manajemen
- d) Biaya untuk pengembangan
- e) Biaya penyuluhan dan pembinaan masyarakat.

Aspek pembiayaan merupakan sumber daya penggerak agar roda sistem pengelolaan persampahan dikota tersebut dapat bergerak dengan lancar. Sektor pembiayaan ini menyangkut beberapa aspek, seperti:

- a) Proporsi APBN/APBD pengelolaan sampah, antara retribusi dan biaya pengelolaan sampah
- b) Proporsi komponen biaya tersebut untuk gaji, transportasi, pemeliharaan, pendidikan dan pengembangan serta administrasi
- c) Proporsi antara retribusi dengan pendapatan masyarakat
- d) Struktur dan penarikan retribusi yang berlaku.

Retribusi persampahan merupakan bentuk konkrit partisipasi masyarakat dalam membiayai program pengelolaan persampahan. Bentuk penarikan retribusi dibenarkan bila pelaksanaannya adalah badan formal yang diberi kewenangan oleh pemerintah.

5. Peran Serta Masyarakat

Tanpa adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah, semua kebijakan pengelolaan sampah yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu

pendekatan kepada masyarakat untuk dapat membantu kebijakan pemerintah dalam kebersihan adalah bagaimana membiasakan masyarakat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Hal ini antara lain menyangkut:

- a) Bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib dan teratur
- b) Faktor-faktor sosial, struktur, dan budaya setempat
- c) Kebiasaan dalam pengelolaan sampah selama ini.

Pengelolaan sampah adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka menangani permasalahan sampah mulai dari proses sejak ditimbulkan sampah sampai pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan didalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbunan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan (transfer dan transport), pengolahan dan pembuangan akhir (Kuncoro Sejati, 2009: 24).

1. Penimbunan Sampah

Pada dasarnya sampah tidak diproduksi, tetapi ditimbulkan. Oleh karena itu dalam menentukan metode penanganan yang tepat, penentuan besarnya timbulan sampah sangat ditentukan oleh jumlah pelaku kegiatannya. Spesifikasi timbulan sampah untuk kota sedang adalah 2,75 – 25 liter/orang/hari atau 0,7 – 0,8 kg/orang/hari, sedangkan untuk kota besar adalah 1 kg/orang/hari.

2. Pengumpulan Sampah

Kegiatan ini merupakan tindakan pengumpulan sampah dari sumbernya menuju ke tempat pembuangan sementara. Pola pengumpulan sampah ini pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua pola yaitu pola individual dan pola komunal.

3. Pengangkutan

Pengangkutan merupakan usaha pemindahan sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) menuju tempat pembuangan akhir (TPA) dengan menggunakan truk sampah.

4. Pengolahan

Sampah dapat diolah tergantung pada jenis dan komposisinya. Berbagai alternatif yang tersedia dalam pengolahan sampah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Transformasi fisik, meliputi pemisahan sampah dan pemadatan yang bertujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pengangkutan
- 2) Pembakaran (incinerate), merupakan teknik pengolahan sampah yang dapat mengubah sampah menjadi bentuk gas, sehingga volumenya dapat berkurang hingga 90-95%. Meskipun teknik ini sangat efektif, tetapi teknik ini sangat tidak dianjurkan. Hal ini menyebabkan karena teknik ini menyebabkan pencemaran lingkungan udara.

- 3) Pembuatan kompos, yaitu mengubah melalui proses mikrobiologi menjadi produk lain yang dapat dipergunakan. Output dari proses ini adalah kompos dan gas bio.
- 4) *Energy recovery*, yaitu transformasi sampah menjadi energi, baik energi panas maupun energi listrik. Metode ini telah banyak dikembangkan di negara maju.

5. Pembuangan Akhir

Pembuangan akhir sampah harus memenuhi syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan. Teknik ini yang saat ini dilakukan di kabupaten Sleman adalah open dumping, yaitu sampah yang ada hanya ditempatkan begitu saja hingga kapasitasnya tidak lagi terpenuhi. Adapun teknik yang direkomendasikan adalah *sanitary landfill* yaitu pada lokasi TPA dilakukan kegiatan tertentu untuk mengolah timbunan sampah.

F. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan diteliti. Definisi konsepsional juga digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu social (Singarimbun, 1995: 34). Agar bisa memberikan gambaran yang lebih jelas, maka perlu diberikan definisi-definisi konsep sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap program, kegiatan, ataupun organisasi. Adapun alur untuk mengukur efektivitas adalah:

- a. Pencapaian Tujuan
- b. Integrasi
- c. Adaptasi

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan yang dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional itu akan menunjukkan alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel (Ardinal, 2005: 60).

1. Adapun untuk mengukur efektivitas program pengelolaan sampah berbasis kelompok masyarakat dalam penelitian ini diperlukan indikator sebagai berikut:

a. Pencapaian tujuan

1) Dasar Hukum

- Ketertiban umum yang terkait dengan penanganan sampah
- Peraturan tarif retribusi atau pelayanan pengangkutan sampah

2) Sasaran Program

- Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program

3) Kurun Waktu

- Tata cara penyelenggaraan program

b. Integrasi

1) Sosialisasi

- Peran serta masyarakat dan stakeholder

2) Pengembangan konsensus

3) Komunikasi dengan organisasi lain

c. Adaptasi

1) Tolak ukur proses pengadaan

- Teknik operasional
- Pembiayaan

2) Pengisian tenaga kerja

- Bentuk lembaga dan organisasi pengelolaan

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara tepat mengenai sifat-sifat dari keadaan ataupun hubungan antara objek penelitian dengan gejala kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk studi kasus dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dilapangan. Data primer dihasilkan dari sumber aslinya yang berupa wawancara atau observasi kepada berbagai pihak yang mengetahui dan memahami mengenai program pengelolaan sampah TPS3R di Kabupaten Sleman. Adapun respondennya adalah Dinas Lingkungan Hidup seksi Pengelolaan Persampahan, selaku pihak yang bertanggungjawab dengan program ini.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun. Adapun sumber data seperti buku-buku yang berkaitan dengan program pengelolaan sampah TPS3R, arsip-arsip dan dokumen resmi

Dinas Lingkungan Hidup yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep penelitian terhadap individu manusia yang menjadi unit analisis penelitian ataupun terhadap individu yang dianggap memiliki data mengenai unit analisis penelitian (Dian Eka Rahmawati, 2010: 33).

Dalam hal ini responden/narasumber yang dipilih dalam wawancara adalah Kepala Seksi Persampahan Dinas Lingkungan Hidup selaku pihak yang bertanggungjawab dengan program tersebut, Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup selaku pihak yang bertanggungjawab dalam proses retribusi dan pengangkutan sampah ke TPA, KPSM Dusun Sucen selaku pelaksana program TPS3R.

b. Dokumentasi

Dokumen-dokumen strategis, seperti peraturan perundang-undangan, berita acara rapat, laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, dan laporan penelitian pihak ketiga selama pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan sampah

tersebut. Hal ini merupakan pengetahuan eksplisit yang sangat berguna untuk diklasifikasikan dan di analisis.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Rekapitulasi pengangkutan sampah perjalur (UPT)
- 4) Laporan Pembentukan KPSM di Kabupaten Sleman
- 5) LAKIP Tahun 2015 dan 2016

4. Teknik Analisa Data

Analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisaikan atau pengelompokan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, mengsintesiskannya, menemukan apa yang penting dan apa yang harus dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2012: 248).

Proses-proses analisis data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, pada tahap ini kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti, dan setelah pengumpulan data yang dapat

di analisis. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan multi sumber bukti, membangun rangkaian bukti dan klarifikasi dengan informan tentang draft kasar dari laporan penelitian.

- b. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Dalam proses reduksi data, peneliti melakukan pemilihan terhadap data yang akan di kode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan dan cerita-cerita apa yang sedang berkembang.
- c. Penyajian data, yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- d. Penarikan kesimpulan, dari proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Jika penelitian masih berlangsung, maka setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus di verifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid.